

## "Segi Tiga Suci":

# Kekuasaan, Agama, dan Seni Visual

**MENEM-  
PATKAN**  
 kekuasaan,  
 agama, dan seni  
 visual sebagai  
 "segi tiga suci"  
 dalam konteks  
 sosial-politik di  
 Indonesia, kita  
 seperti dipaksa  
 untuk mengakui  
 adanya sebuah  
 "daerah tak bertu-  
 an" (*terra  
 incognita*) yang  
 cair, licin, dan  
 beralih-ubah yang

memungkinkan  
 kita menyaksikan  
 pertarungan yang  
 tiada terpermanai,  
 tidak habis-habis-  
 nya dan akan terus  
 berlangsung-seti-  
 daknya pada tiga  
 ranah yang berbe-  
 da, tetapi saling  
 bertukar tangkap  
 atau berkaitan  
 antara satu  
 dengan yang lain.

Pembakaran karya instalasi Tisna Sanjaya yang berjudul *Special Prayer for the Dead* oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Babakan Siliwangi Bandung pada 5 Februari 2004 lalu adalah sebuah ilustrasi yang bagus perihal pertarungan antara negara dengan masyarakat. Dalam kasus ini, kita menyaksikan sebuah pertarungan yang berlangsung secara tidak berimbang, pincang, dan berat sebelah. Negara-melalui bantuan *repressive state apparatus* (Satpol PP-Birokrasi-TNI) menunjukkan dominasi untuk memberangus keberadaannya karya seni milik seorang seniman dengan pemaksaan (*coercive*) secara fisik. Dominasi ini memperlihatkan negara "masih" memiliki kekuasaan-lebih (*surplus power*) yang melampaui kekuatan kritis masyarakat. Saya sebut "masih", karena dominasi itu berlangsung di tengah masa kebebasan berpendapat dan keeluasaan berekspresi yang selama tiga dasawarsa sebelumnya mustahil bisa dirayakan oleh masyarakat di negeri ini. Ironis!

Betapa tidak, kritik dan kecaman dari sejumlah masyarakat (intelektual, kritikus, dan pengamat seni rupa) yang dimuat di sejumlah media massa terhadap tindakan semena-mena penguasaan dan aparat militer itu tak digubris sama sekali. Bahkan, demonstrasi yang digelar oleh Ratna Sarumpaet, ketua Dewan Kesenian Jakarta, untuk menggugat dominasi itu bertalu-sepi dan berkesan sebagai tak lebih dari sekadar colotohan orang-orang yang orowet dan kurang kerjaan. Sampai-sampai muncul sebuah pendapat lain, bahwa lepas dari persoalan estetika karya instalasi Tisna Sanjaya yang menuntun pandangan seorang kritikus seni rupa "cenderung jorok dan samasekali tidak estetik" (Agus Dermawan T., 2004: 152) pembakaran itu bisa dipahami berdasarkan perimbangan etika karya tersebut, yang memang lampak argon dan tak ets dalam mengantik keberadaan tentara di republik ini.

Selain dominasi, negara menunjukkan kekuatan besarnya melalui hegemoni atau-pinjam kalimat Ignas Kleden (2004: xxiv) penguasaan negara terhadap makna lebih (*surplus meaning*). Kekuatan ini dapat kita lihat dalam, misalnya, kasus penghentian peredaran kaset penyanyi Ateek CB yang memasang gambar palu anti-dar pasaran pada paruh awal 1990-an. Di sini, tanpa bisa dirlenupsi, negara telah memaksakan sebuah interpretasi tunggal terhadap gambar itu sebagai simbol terlarang, berbahaya, dan dapat meresahkan stabilitas ideologi masyarakat.

Dan berbeda dari kasus Tisna Sanjaya, dalam kasus Ateek CB itu kita sedikit pun tak mendengar adanya tanggapan kritis



dari masyarakat untuk mempertanyakan kembali keabsahan interpretasi itu yang seakan-akan menunjukkan bahwa masyarakat secara sukarela menerima pelajaran itu sebagai sesuatu yang harus diakui kebersejajaran dengan tafsiran resmi negara. Namun, sikap diam itu bisa kita pahami dan maklumi, mengingat pada masa itu negara berada di genggaman rezim Soeharto yang memang sangat gemar membeberang apa saja dan siapa pun yang dipandang tak sejalan dengan ideologi politik Orde Baru.

**Massa vis a vis Individu**  
 Misalnya, kedua kasus tersebut telah membelah keberadaan masyarakat dalam posisi bipolar yang saling bersejangan dalam suatu pertarungan "kepentingan" untuk memperubungkan kekuasaan, terutama pada masa ketika negara sedang mengendurkan pengaruh besarnya (dominasi dan hegemoni) di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, kekuasaan merajalela sebagai apa yang disebut Michel Foucault (1980: 198) "sekumpulan relasi yang dikordinasikan", biasanya berdasarkan kesatuan "kepentingan" politik, agama, suku, dan pengetahuan, yang membuat sebagian orang percaya bahwa kekuasaan pada dasarnya "berada di mana pun di sekitar tubuh sosial" (Daniel Dinkler, 2003: 62), sehingga tak menyalakan ruang bagi otonomi keserian atau kekuasaan bereksistensi secara individu.

Dalam ingatan kita, kasus penyegelan "turu" patung-patung karya Dadang Christanto yang dipajang dalam pameran seni rupa bertajuk *Kengerit Tak Terucapkan di Benteng Budaya Jakarta* pada Juli 2002 adalah contoh yang representatif tentang kekuasaan yang hadir di mana-mana (*omniprensens*), sekaligus fakta terkini perihal pertarungan antara komunisme dengan individualisme. Kita tentu belum lupa, bahwa komunisme yang direpresentasikan oleh masyarakat sekitar bangunan milik kelompok Kompas-Gramedia itu "memenangkan" pertarungan ini tanpa melakukan pemaksaan yang bersifat fisik. Yang terjadi adalah pemaksaan yang hampir-hampir bersifat kasat mata untuk memberlakukan suatu pemahaman tertentu terhadap wujud suatu karya seni yang dikawatirkan akan merusak "nilai" atau "moral" masyarakat yang sudah terbangun-mapan.

Tragisnya, tak ada seorang pun dari kelompok kritis yang berupaya untuk mempersoalkan pemaksaan pemahaman itu secara diskursif, sebagaimana yang berlaku dalam kasus Tiana Sanjaya. Maka, menjadi biasa dimengerti kalau pameran itu sekalipun tetap digelar berlangsung hambar, dan sudah tentu menggecewakan sang seniman, yang sebelumnya sudah dipaksa untuk melakukan sensor diri (*self-censorship*) di bawah kontrol dan pengawasan mata-publik.

Bericara tentang sensor diri yang dilakukan oleh para seniman, saya teringat pada kasus yang menimpa perupa Yuswanto Adi. Kasus ini memang tak pernah terpublikasikan di Film Negara, perusahaan film negara yang dikelola oleh Brijnen G Dwipayana, staf pribadi Presiden Soeharto. Sebagaimana sudah umum diketahui, kedua film tersebut adalah film propaganda Orde Baru yang sengaja dibuat untuk mempertunjukkan Soeharto sebagai "pahlawan militer" yang "menghancurkan kepemimpinan Komunis" (Kishina Sen dan David T Hill, 2001: 171-172), tokoh utama dalam perang kemerdekaan melawan Belanda" (Virginia Matheson Hooker, 2001: 498-499) dan "sosok pemimpin yang ideal, tentara yang loyal dan pemberani, aristokrat yang pemurah dan baik hati, serta selalu berusaha mempersatukan rakyat" (Budi Irawanto, 1999: 159).

Propaganda itu tidak hanya berhasil secara politik, tetapi juga secara artistik. Sebagaimana dikemukakan oleh Kishina Sen dan David T Hill (2001: 172), sejak 1980-an hingga 1997, Penglihatan merupakan film "wajib putar di sekolah-sekolah dan departemen pemerintah" dan wajib disiarkan pada sekitar tanggal 30 September setiap pada waktu itu. Karena itu, menjadi biasa dimengerti jika kedua Indonesianis dari Australia itu "tampa keraguan sedikit pun" menilai *Penglihatan* sebagai "film Indonesia yang paling banyak disiarkan dan ditonton".

Adapun *Serangan Fajar*, sekalipun diketahui "berisi sejarah busteran" (Virginia Matheson Hooker, 2001: 171) berhasil menarik perhatian dengan *Juri Festival Film Indonesia* pada tahun 1982. Sebagaimana dicatat oleh Budi Irawanto (1999: 192), film ini memenangkan *Juri Piala Citra* untuk Film, Sutradara, Pemeran Pembantu Perempuan (Suparmi), Artisik (Fred Wetik, Faraz Effendi, Nadiyah), dan Musik (Embie C. Noer); satu *Piagam Penghargaan Khusus* untuk Pemeran Anak-Anak (Dani Marsuni); dan tiga *Unggulan* untuk Skenario (Arifin C. Noer), Pemeran Pembantu Pria (Amoros Katarnis), dan Fotografi (Mu Soleh Rustan). Besi pada itu sebabnya, seperti diungkapkan oleh Saya Sasaki Shirashi (2001: 238), Presiden Soeharto amat menyukai kedua film tersebut.

Seluruh keterangan di atas membuat kita semakin berakasi untuk menyebut Arifin C Noer sebagai seorang seniman atau intelektual organik yang merajalela dan mengartikulasikan kepentingan negara dan politik Orde Baru, meskipun sampai saat ini kita tak boleh keterangan sedikit pun perihal keterlibatan, juga keikutsertaan sejumlah seniman, intelektual, dan budayawan, antara lain Bagong Kusudiarjo, Syuh-ba Asa, dan Umar Kayam dalam kedua film propaganda itu. **Bentuk dan Isi**

Antara kasus Tiana Sanjaya dan Dadang Christiano tersirat sebuah pertarungan yang lain lagi. Saya ingin menyebutnya sebagai pertarungan antara "bentuk" dan "isi" dan ini merupakan pertarungan yang paling menggejalakan bagi pemeluk agama tertentu. Apa yang ditunjukkan oleh Hainus Salim, direktur Lembaga Kajian Islam dan Sosial, dalam luas di tengah masyarakat, tetapi telah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat seni rupa, khususnya di Yogyakarta. Saya adalah salah seorang yang mengetahui kasus itu secara langsung dari mulut perupa tersebut tambun itu.

Khusus, pada suatu hari di pertengahan tahun 2003, perupa kelahiran Semarang, 11 November 1966, itu diminta oleh sebuah penerbit buku besar di Jakarta untuk membuat gambar sampul buku kumpulan cerita pendek karya cerpen Triyanto Triwikromo. Permintaan ini diterima dengan senang hati dan ia pun langsung tancap gas mengerjakan. Singkat cerita, gambar sampul buku itu selesai dikerjakannya, tapi belum terujinya perupa yang memperoleh Grand Prize Winner Philip Morris ASEAN Art Award 1997 di Manila itu.

Pasalinya, gambar sampul buku tersebut terlihat tidak sesuai dengan "aslinya". Menurut pengamatan dia, ada detail gambar-yaitu kopiah haji dan tasbih yang dihilangkan oleh penerbit buku itu. Setelah dikonfirmasi, menurut hasil penyunting, gambar-gambar itu terpaksa disensor karena terlalu sensitif untuk ditampilkan. Apa mau dikata, demi kemaslahatan bersama, sama perupa menerima penyuntingan atau penyensoran itu dengan khlis. Tampaknya, ada semacam ketakutan dalam diri mereka (self-imposed) untuk tidak mengukus gambar-gambar itu dari tafsir resmi yang dipercaya oleh penganut agama Islam.

Namun, justru di situah sensor-diri itu terjadi dan pada saat yang bersamaan, pengertian hegemoni, yaitu "pemaksaan secara liberal, karena yang bersangkutan seakan-akan secara sukarela melakukan sesuatu, karena alam pikiran dan cara pikinya telah diarahkan sedemikian rupa untuk mengikhti suatu pandangan tertentu, sering kali tanpa dia sendiri menyadarinya" (Kleden, 2004: xxx-xxx), terlempar dengan baik dalam kasus ini, sekalipun saya tahu Yuswanto Adi adalah seorang perupa yang terbilang kritis dan tak gampang terpengaruh oleh pandangan politik dan ideologi tertentu yang bermaksud mengelabui kesadaran dirinya dalam berkarya, seperti yang sudah ia tunjukkan dalam banyak karya lukisnya selama ini.

Maka, kerelaannya dalam melakukan sensor diri boleh dibling sebagai semacam kompromi estetik dan politik, dan karena itu, menghindarkan dirinya untuk ditempatkan secara kategori ke dalam kelompok seniman atau intelektual "organik", yang selurut pendapat Antonio Gramsci (1971) adalah kaum yang "mengartikulasikan pandangan dunia, kepentingan, tujuan, dan kemampuan kelas tertentu". Dalam pengertian ini, salah sebuah contoh yang saya kira pas untuk ditunjukkan di sini ada dalam diri dramawan dan sineas terkemuka Arifin C Noer (1941-1995).

Seperti kita ketahui, pada tahun 1981 dan 1982, Arifin C Noer menyutradarai film *Serangan Fajar* dan *Penglihatan Gerakan 30 September* atas instruksi dan biaya Pusat Produkt-diskusi terbatas tentang persoalan itu di Yayasan Seni Cemeti, Yogyakarta, beberapa waktu lalu dengan mengambil komik "serali" sebagai kasus-saya kira merupakan contoh yang cukup lengkap untuk membuktikan adanya pertarungan itu. Kita tahu, komik adalah medium seni "sekolah" yang pemah diad sebagai barang "sampah" yang berbahaya bagi "keselamatan" moral dan mental anak-anak dan itu sebabnya, bila ada orang dewasa yang masih gemangari komik, maka mereka akan dipunt sebagai tukang khayal yang kakanak-kanakan.

Saya kira, pandangan negatif ini sudah lama ditinggalkan orang-karena bentuk komik yang bersifat artistik ternyata dipatah disisi dengan nilai-nilai positif, seperti yang sudah dipraktikkan oleh penerbit Mizan yang dikenal luas banyak memproduksi komik-komik betema dan bermuansa Islam. Tampaknya, dalam pemahaman ini, bentuk dan isi suatu karya seni menjadi satu yang signifikan bagi sebagian pemeluk agama "semesta" di Indonesia. Dan hal ini, saya kira, tak hanya berkenaan dengan komik, tetapi juga medium seni lainnya, seperti seni desain gratis misalnya.

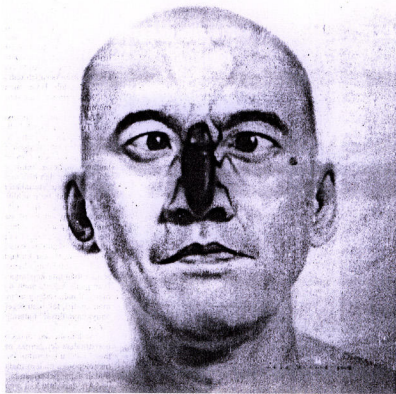
Untuk itu, marilah kita ingat kasus novel *Supernova* (Episode: Akar) karya Dewi Lestari, yang sempat menyita perhatian banyak orang di negeri ini pada pertengahan 2003. Seperti kita ketahui, novel tersebut terbit dengan gambar sampul naga melingkar dengan latar berwana hitam pekat yang dibuat oleh RE Hartanto, penpa dan pengajar seni rupa di Institut Teknologi Bandung. Entah disadari atau tidak oleh perupa ini, gambar itu ternyata merujuk kepada lambang Omikara/Aum yang merupakan aksara suci Brahma, Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Hindu. Oleh sebagian penganut agama Hindu, dalam hal ini Generasi Muda Hindu Indonesia, pencatuman gambar itu dianggap sebagai tindakan profanas untuk tidak mengaitkan pelodohan terhadap simbol keagamaan yang mereka sakralkan. Dengan perkataan lain, mereka menolak lambang atau aksara yang mengandung nilai kesucian itu disematkan secara samar-mimra di sebuah medium (bacaan) yang bersifat kedunawian yang menurut pendapat mereka, "tidak ada hubungannya dengan kitab suci atau buku keagamaan Hindu".

Pencatuman itu memang tak benjang pada pemaksaan feik untuk menghentikan peredaran novel tersebut dari toko-toko buku, sebagaimana pernah menimpa buku *Pemikiran Karl Marx* karya Franz Magnis-Suseno, yang diganggu dan dibakar oleh sekelompok masyarakat yang menamakan diri *Alansi Anti Komunis* pada 19 April 2001. Tetapi, kita telanjur tahu bahwa ada mala publik dan mala penguasa yang senantiasa mengawasi kerja kreatif para pekerja seni, sastrawan dan cendekiawan-dan sebab itu menuntut mereka untuk bersikap hati-hati. Bila tidak, kejadian yang sama pedhinya bakal terulang, seperti yang baru-baru ini menimpa Iwan Fals. Sebagaimana yang dibicarakan oleh sejumlah media massa, pada 4 Juni 2004 lalu, Forum Intelektual Muda Hindu Dhama (FIMHD) mengajukan protes kepada Iwan Fals atas pencatuman gambar Dewa Wisnu di sampul depan kaset terbaru yang berjudul *Manusia 1/2 Dewa*, yang diproduksi oleh PT Musica Studio.

Menurut pendapat Shri AA Ngarah Aya Wedakama Mahendradatta, ketua FIMHD, mereka keberatan gambar suci itu dipakai sebagai sampul "album rekaman komersial yang tidak ada hubungannya dengan budaya dan agama Hindu". Lebih dari itu, mereka khawatir pencatuman itu akan memunculkan persepsi bahwa Dewa Wisnu adalah manusia setengah dewa, persepsi yang "jelas bertentangan dengan ajaran Hindu yang menyakini Dewa Wisnu sebagai salah satu dari tiga Dewa Utama (Tri Murti: Brahma, Wisnu, Siva) Yang Maha Sempurna". Pendek kata, dengan segala keberatan itu, mereka menghimbau dan meminta kepada Iwan Fals dan "semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan sampul tersebut untuk mengganti dan tidak lagi mencantumkan lambang Dewa Wisnu dan simbol-simbol yang berhubungan dengan agama Hindu". Apa boleh buat, kisah lama yang mendera lalu, mengelukak lenaga, dan membinas rasa tenak-hak menderu kembali di sini.

Paristwa tersebut, untuk kesekian kalinya, membuat kita sadar bahwa selama ini kita sedang berhadapan dengan persoalan serius di sekitar bentuk dan isi, bahwa keleluasaan berekspresi masih merupakan sesuatu atau perkara yang amat menggelisahkan, mengkhawatirkan, dan mereahkan bagi sebagian penganut agama, bahwa kemerdekaan individu dalam masyarakat belum sepenuhnya terdipita di Tanah Air ini, di mana negara dan aparatusnya masih terus berhasrat menundukan, membelak dan memberangus daya kritis dan kreatif masyarakat.

Itulah sebabnya kenapa tulisan ini perlu saya kelen-gahkan di sini. Paling tidak untuk sekadar menandakan bahwa perjuangan kita hari ini di negeri ini adalah-pinjam kalimat sastrawan Ceko, Milan Kundera, perjuangan ingatan melawan lupa. Dan ini adalah sebuah keniscayaan sejarah yang tak dapat dibatalkan, sebab semakin sering kita melupakan dan merelakan diri ke dalam alpa, sadar atau tidak, maka kita akan semakin dekat dengan penjara kekuasaan yang pada suatu saat kelak bakal mempersimpit, menggingkang, dan mengendalikn hidup kita, di mana resiko kehilangan kebebasan menjadi salah satu perkara yang tak tertanggungkan. (Wahyudin-72)



Kecoa di Depan Mata karya Agus Wage

Kabag Penerbit